



Membangun Identitas: Kapitan Arab Batavia, 1844-1942

Ismahan,¹ Humaidi,^{1*} Abrar¹

¹Universitas Negeri Jakarta; Indonesia

*humaidi@unj.ac.id

Dikirim: 15-12-2024; Direvisi: 30-05-2025; Diterima: 07-06-2025; Diterbitkan: 31-08-2025

Abstrak: Keberadaan etnis keturunan Arab di Batavia merupakan sebuah hal yang menarik untuk ditelusuri, mengingat statusnya sebagai etnis pendatang, tetapi menerima sambutan baik oleh masyarakat setempat. Tulisan mengenai “Kapitan Arab di Batavia” ini, merupakan sebuah potret kehidupan sosial etnis keturunan Arab dalam membangun dan membentuk komunitas di Batavia. Kajian dimulai pada tahun 1844, ketika Said Na’um diangkat sebagai Kapitan Arab pertama, dan diakhiri pada tahun 1942 dengan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda yang juga mengakhiri secara formal keberadaan kapitan Arab Batavia. Penelitian ini dilakukan lewat metode sejarah, yang melalui tahapan pemilihan topik, heuristic, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Tulisan ini memiliki argumen bahwa Kapitan Arab Batavia memiliki peran awal sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah Kolonial dengan Komunitas Arab, sekaligus mengusahakan kemajuan dalam bidang perdagangan maupun pendidikan. Namun demikian, pola stratifikasi ala hadrami di Batavia, terkadang memicu lahirnya konflik antar kelompok, seperti antara kelompok Jamiat Kheir dan Al Irsyad. Diantara Kapitan Arab Batavia, maka figur Kapitan Umar Manggus menjadi penting sebagai pemimpin komunitas yang ikut mendorong terjadinya perubahan. Ia memimpin komunitas Arab di tengah gelombang reformasi penolakan atas eksklusifitas kaum sayyid. Latar belakangnya sebagai bagian dari stratifikasi bawah, menempatkannya sebagai agen perubahan untuk membentuk komunitas Arab Batavia menjadi lebih egaliter. Sikap pemerintah kolonial cenderung pasif, karena tidak terlibat dalam pusaran konflik akan lebih menguntungkan dalam memelihara orde ketertiban.

Kata Kunci: Arab; Batavia; kapitan

Abstrak: The existence of ethnic Arab descendants in Batavia is an interesting thing to explore, given their status as ethnic migrants, but received a good welcome by the local community. This paper on “Kapitan Arab in Batavia” is a portrait of the social life of ethnic Arab descendants in building and forming a community in Batavia. The study begins in 1844, when Said Na'um was appointed as the first Arab Kapitan, and ends in 1942 with the end of Dutch colonial rule which also formally ended the existence of the Batavian Arab Kapitan. This research is conducted through the historical method, which goes through the stages of topic selection, heuristics, verification, interpretation and historiography. This paper argues that the Arab Kapitan of Batavia had an initial role as a liaison between the policies of the colonial government and the Arab community, as well as seeking progress in the fields of trade and education. However, the hadrami-style stratification pattern in Batavia sometimes triggered conflicts between groups, such as between the Jamiat Kheir and Al Irsyad groups. Among the Arab Kapitans of Batavia, the figure of Kapitan Umar Manggus is important as a community leader who helped drive change. He led the Arab community in the midst of a reform wave that rejected the exclusivity of the sayyids. His background as part of the lower stratification placed him as an agent of change to shape the Batavian Arab community to become more egalitarian. The colonial government's attitude tended to be passive, because not being involved in the vortex of conflict would be more beneficial in maintaining the order.

Keyword: Arab; Batavia; Kapitan



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Kehadiran orang Arab di Nusantara, turut mewarnai perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Van den Berg, orientalis dan pakar hukum Belanda yang pada tahun 1884-1886 melakukan penelitian mengenai orang Arab di Hadramaut dan di Indonesia, menyebutkan orang-orang Arab yang bermukim di nusantara umumnya berasal dari Hadramaut. Hanya sedikit yang berasal dari Muskat di Teluk Parsi, Hijaz, Mesir atau Afrika Utara.

Masyarakat Arab yang berasal dari Hadramaut, ketika tiba di Nusantara masih menganggap memiliki status sosial sama ketika berada ditempat asalnya. Mereka masih berpedoman kepada asal keturunan atau darah untuk menentukan status sosial dimasyarakat, dimana golongan Sayyid (yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah) memiliki stratifikasi sosial lebih tinggi dibandingkan dengan golongan non-Sayyid. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan persaingan antara kedua golongan, dan kemudian tergambarkan dalam rivalitas antara organisasi Jamiatul Kheir-Rabithah Alawiyah dan Al Irsyad (Kesheh,1999).

Sebagai etnis pendatang, keberadaan Orang Arab kemudian diatur sedemikian rupa oleh pemerintah kolonial agar tidak menimbulkan masalah lewat kebijakan politik segragasi. Buah politik segragasi adalah berbagai kebijakan pemerintah kolonial yang berupa sistem pemukiman, sistem surat jalan, dan sistem imigrasi, merupakan cara untuk membentuk orang Arab sebagai etnis yang eksklusif. Kebijakan pengelompokan tempat tinggal berdasarkan kelompok etnis misalnya, kemudian melahirkan berbagai perkampungan etnis, seperti: Kampung Melayu, Kampung Bugis, Kampung Bali, Kampung Pekojan, Pecinan dan sebagainya (Niemeijer, 2012)

Pada tahun 1844, akibat banyaknya pendatang Arab Hadramaut di Kawasan Pekojan, maka pemerintah Belanda kemudian mengharuskan adanya kepala koloni yang dinamai kapitan, kapiten atau kapten Arab untuk mengurus dan memimpin perkampungan etnis Arab. Hal ini juga menunjukkan bahwa komunitas Arab telah menjadi komunitas mapan di Batavia. Kawasan Pekojan, awalnya merupakan kawasan yang ditempati pendatang asal Khoja atau Benggali, yang lambat laun ditinggalkan dan tergantikan etnis Arab (De Jonge, 2019). Keberadaan Kapitan diperlukan Belanda sebagai perwakilan penguasa kolonial yang menjamin keamanan di Kawasan Pekojan, sekaligus menjadi penghubung antara masyarakat Arab Pekojan dengan pemerintah kolonial.

Antara tahun 1844 hingga 1942, terdapat lima orang Kapitan Arab Batavia, meliputi: Said Na'um Basalamah (1844-1864), Muhammad bin Abubakar 'Aydid (1864-1877), Muhammad Umar Babeehir (1877-1902), Umar bin Yusuf Manggus (1902-1931) dan Hasan Argubi (1931-1942). Kelima Kapitan ini berasal dari kelompok stratifikasi sosial hadrami yang berbeda, sehingga tentunya akan menarik untuk membandingkan kebijakan antara kapitan tersebut.

Sebagai sebuah kajian sejarah, terdapat beberapa kajian terdahulu yang bersinggungan dengan kajian ini. Kajian pertama adalah monograf yang ditulis oleh Natalie Mobini Kesheh yang berjudul "Hadrami Awakening" (Kesheh, 2007). Kesheh menyoroti ketegangan antara kaum Arab Hadrami yang terbelah antara kesetiaan terhadap Hadramaut (wilayah asal mereka) dan nusantara, serta bagaimana mereka membentuk identitas baru di tanah air. Argumen yang dikemukakan Kesheh adalah adaptasi politik dan sosial yang mendorong lahirnya sebuah pandangan positif nasionalisme Arab terhadap Indonesia. Kesheh memiliki jangkauan penelitian luas yang meliputi seluruh kawasan Indonesia. Kajian kedua adalah monograf yang

ditulis oleh Artono yang berjudul *Komunitas Arab di Kota Surabaya 1900-1942*. Kajian ini merupakan sebuah pemotretan atas sebuah kehidupan sosial-politik ekonomi komunitas Arab di Surabaya, sebuah kota besar yang memiliki tingkat heterogenitas yang mirip dengan Batavia.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini berfokus untuk mendeskripsikan keberadaan Kapitan Arab Batavia antara tahun 1844 hingga 1942 yang melahirkan sebuah perubahan struktur sosial. Artikel ini diharapkan memberi kontribusi terhadap mahasiswa sejarah, pecinta kajian sejarah dan komunitas Arab di Jakarta terkait keberadaan komunitas Arab Batavia yang memiliki jejak sejarah panjang dan terus berproses hingga masa sekarang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yang didasarkan kepada prinsip-prinsip sistematis dan seperangkat aturan-aturan untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan menyajikan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Menurut Kuntowijoyo, penelitian sejarah mempunyai lima tahapan, yaitu: pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), verifikasi (kritik), interpretasi (analisa dan situs), dan penulisan sejarah atau historiografi (Kuntowijoyo, 2001).

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder. Sumber primer terdiri dari arsip, dokumen dan laporan sezaman. Dalam penelitian ini, sumber kearsipan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta dokumen-dokumen baik resmi maupun catatan yang berada di tangan penggiat sejarah lokal dan sejarah kebudayaan. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan dalam kajian penelitian ini, meliputi kajian penelitian terhadap kurun waktu tersebut (1844-1942), baik yang disajikan dalam bentuk laporan penelitian, jurnal atau majalah ilmiah dan buku. Diantara sumber primer yang digunakan antara lain: Surat Kabar *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie* 15 Juni 1901, Majalah Borobudur edisi tahun 1923 dan *Bataviaasch nieuwsblad* 11 April 1940.

Kajian ini menggunakan pendekatan strukturasi yang menekankan bahwa dalam sebuah proses perubahan sejarah, terdapat suatu hal yang berjalan secara sistemik, tetapi kemudian di dalam sistem tersebut melahirkan agen yang melakukan perubahan dan membentuk struktur baru. Tema sentral sejarah strukturasi adalah peran manusia sebagai agensi di dalam proses-proses penstrukturasi sosial, baik yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja (Giddens, 2004; Zuhdi, 2008). Llyod mengemukakan, agency adalah kekuatan otonom dari suatu struktur sosial yang memiliki kemampuan untuk bertindak atas nama yang lain, sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertentu (Lloyd, 1993). Dalam kajian ini, agen yang dimaksud adalah kapitan Arab Batavia yang melakukan perubahan untuk merombak tatanan sistem masyarakat dan melahirkan sebuah hal baru. Penelitian ini memiliki arti penting dalam menjelaskan proses perkembangan komunitas etnis Arab Batavia dimasa kolonial, ketika kapitan arab sebagai pemimpin administratif memainkan peranan dalam pengaturan masyarakat.

Hasil Penelitian

Diantara rumpun bangsa besar di dunia, bangsa Arab termasuk salah satu bangsa yang melakukan migrasi ke seluruh dunia. Migrasi orang Arab terjadi karena beragam alasan, seperti: perniagaan, penyebaran agama, peperangan, ataupun pengungsian. Hal terakhir, terjadi sebagai akibat konflik berkepanjangan antar mazhab atau kekuatan politik yang terjadi di beberapa negara Arab dimasa abad pertengahan (Goldschmidt, 2018). Pada abad 17-18, kedatangan mereka disambut dengan kehangatan, mengingat faktor keberagaman mereka yang sama dengan penduduk nusantara (Alatas, 1997). Orang Arab terkadang dipandang secara berlebihan sebagai kaum muslim yang lebih faham agama, mengingat Agama Islam berasal dari kawasan Arab, Nabi Muhammad yang berasal dari bangsa Arab dan al-Qur'an menggunakan bahasa

Arab. Kaum sayyid bahkan banyak yang menikahi puteri raja dan mendapatkan kedudukan penting di istana (De Jonge, 2019).

Awal keberadaan orang Arab di Indonesia sering dikaitkan dengan penyebaran Islam pada abad ke-7 M atau tahun pertama Islam, ketika mereka telah datang ke negeri-negeri Melayu dan kemudian meninggalkan bukti beberapa prasasti di Barus (Hamka, 2016). Secara perlahan, kedatangan orang Arab, kemudian dapat diterima di nusantara yang saat itu dipengaruhi oleh peradaban Hindu-Budha. Islam kemudian mulai dianut secara massif, setelah berhasil mendirikan kesultanan Samudra Pasai, dan menandai penerimaan masyarakat nusantara atas kebudayaan yang dibawa oleh masyarakat Arab. Gelombang kedua migrasi Arab ke Nusantara, terjadi antara abad ke 14 hingga abad ke 15. Pada gelombang ini, tokoh yang terkenal berhasil menyebarkan Islam ke tanah Jawa, Kalimantan dan sekitarnya adalah Wali Songo. Mereka adalah keturunan dari Abdul Malik Azmatkhan yang nasabnya juga berasal dari hadramaut dan bersambung kepada Alawi bin Ubaidillah.

Adapun migrasi orang Arab ketiga, adalah gelombang migrasi terbesar dan kemudian melahirkan komunitas Arab yang lebih mapan dan berbeda dengan gelombang sebelumnya. Gelombang migrasi ini umumnya berasal dari kawasan Hadramaut yang mulai datang secara masal ke Nusantara pada akhir abad 18. Pada awalnya, para imigran yang kebanyakan laki-laki itu tidak berencana untuk menetap di Nusantara. Migrasi yang dilakukan disebabkan oleh kekurangan sumber daya alam dan ketidakstabilan situasi politik internal di Hadramaut. Hadramaut adalah wilayah pegunungan yang gersang, dan hingga abad ke-20 masih merupakan daerah terpencil. Perang suku, perseteruan keluarga, kejahatan, dan perampokan telah lama membuat wilayah itu tidak aman. Mayoritas penduduk hidup dari pertanian beririgasi yang hanya dimungkinkan didasar sungai ketika curah hujan cukup tinggi. Dengan demikian, tujuan awal migrasi hanyalah untuk mendapatkan uang dengan cepat untuk membantu kerabat yang miskin atau menabung untuk jaminan hari kemudian yang lebih baik, sekedar mencari "Cincin Nabi Sulaiman" atau mencari peruntungan.

Dengan membaiknya kondisi-kondisi ekonomi di Hindia dan juga perhubungan laut dengan Timur Tengah terutama setelah dibukanya Terusan Suez pada tahun 1869, berimbas kepada jumlah migrasi orang Arab ke Nusantara yang semakin meningkat (Yudi Latif, 2005). Puncak arus migrasi orang-orang Arab ke Nusantara, terjadi secara besar-besaran pada abad 19. Menurut data statistik hasil sensus tahun 1885, di Jawa dan Madura tercatat jumlah penduduk keturunan Arab yang menetap di Nusantara baik orang Arab yang lahir di Arab maupun yang lahir di Nusantara sebanyak 10.888 orang. Hal ini disebabkan oleh eksodus besar-besaran pasca tahun 1870, ketika pelayaran dengan kapal uap antara Timur Jauh dan Arab mengalami perkembangan yang pesat sehingga memudahkan migrasi masyarakat Arab dari Hadhramaut ke Nusantara.

Di Batavia, karena semakin banyak pendatang Hadramaut, pada 1844 pemerintah Belanda mengharuskan adanya kepala koloni yang dinamai "kapitan atau kapten Arab". Sebagaimana orang Cina, Bugis, Melayu dan berbagai etnis lainnya di nusantara yang bermukim dalam satu tempat pemukiman, orang-orang Arab di Batavia juga menetap di kawasan Pekojan yang artinya tempat orang Koja (sebutan untuk orang Benggali, India). Hal ini menunjukkan bahwa orang Arab menempati lokasi yang dahulu pernah ditempati oleh orang Benggali yang kemudian tidak ada lagi. Selain Pekojan, orang Arab juga membentuk pemukiman di pinggiran Batavia, seperti daerah Krukut dan Tanah Abang.

Warisan Stratifikasi Masyarakat Arab Hadrami

Berdasarkan dari negeri asalnya, penduduk Arab Hadhramaut terdiri dari empat golongan yang berbeda, yaitu; kelompok *Sadah* atau *Syarif* atau *Sayyid*, kelompok *Syekh*, *kelompok*

Gabili dan kelompok *Masakin* atau *Da'fa*. Ke-empatnya merupakan lapisan stratifikasi yang menunjukkan penghormatan dan kedudukan dalam masyarakat. (Hasyim Assegaf, 2000 ; Al-Haddad, 1997).

Kelompok pertama yakni kaum *Sadah* (Jamak dari *Sayyid* yang artinya tuan) yaitu, golongan tertinggi dan terpendang yang merupakan nigrat keagamaan. karena silsilah nasab mereka yang termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW, dari pernikahan putri Nabi yang bernama Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Umumnya golongan *sadah* Hadhramaut berasal dari keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Mengingat leluhur dalam silsilah mereka adalah Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al Muhajir, maka kelompok ini juga kerap disebut dengan golongan *Ba'alawi*. Diantara nama-nama fam Ba'alawi adalah *Al-Attas, al Haddad, Al Gadri, Bafagih, Assegaf dan sebagainya*.

Kelompok kedua, yakni *Masyayikh* (Jamak dari *Syaikh* yang berarti orang tua atau orang yang beriman) merupakan golongan dalam masyarakat Arab yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran (*ta'lim wa ta'allum*). Diantara nama-nama fam dari golongan ini adalah *al Bafadhal, Al Bawazir, al Amudi (Alamudi), al Iskak, al Bajabir, al Skahak, bin Afiff, al Baqis, al Barras*, dan lainnya. Adapun kelompok ketiga, *Qabili* atau *Qaba'il* (Jamak *qabili* yang berarti Suku atau gerombolan) adalah golongan ningrat duniawi. Disebut demikian karena golongan ini di Hadramaut merupakan penduduk yang biasa memanggul senjata. Diantara nama-nama fam mereka adalah *Al Katiri, bin Thalib, bin Mahri, dan al Makarim*. Kelompok keempat, *Masakin* atau *Da'fa* (Jamak dari *dhaif*), yaitu orang-orang Arab yang pada umumnya terdiri dari petani, pedagang, dan pengrajin yang kadang-kadang berkecukupan, tetapi tidak terpendang. Diantara nama-nama fam mereka adalah *Audah, Bamasymus, Faqih, Makki, Baswedan, Argubi* dan sebagainya.

Selain golongan di atas, terdapat juga golongan *Abid* (Jamak dari *abd* yang artinya hamba atau budak). Diantara nama-nama fam golongan ini adalah *Amen, Khansa, Badres, Basadi, Bakhartan, Basalem, bin Musallam*. Dalam perkembangannya, komunitas Arab di Indonesia terbagi menjadi dua golongan besar yaitu golongan *sayyid (sadah)* dan *non-sayyid (masyaikh, da'fa, dan abiin)*. Kedua golongan ini kemudian berselisih paham terutama mengenai masalah *kafa'ah* nikah dan tradisi-tradisi lainnya, yang dipandang menyimpang dari agama Islam. Di Indonesia, salah satu cara untuk membedakan antara kelompok *Alawiyyin dan non alawiyyin* adalah berdasarkan latar belakang organisasi. Umumnya *Alawiyyin* terhubung ke organisasi *Jamiat al-Khair* atau *Rabithah Alawiyah*, sedangkan *non alawiyyin* yakni kelompok *Syekh* atau *Masyaikh* merupakan pengikut organisasi *al-Irsyad*.

Diantara golongan di atas, kelompok yang terhubung dengan aktivitas dakwah Islamiyah di Nusantara ialah golongan *Sayyid* dan golongan *Syaikh*, dimana keduanya banyak memainkan peran dalam bidang keagamaan, walaupun golongan *Sayyid* jauh lebih menonjol ketimbang golongan *Syaikh*. Para *Sayyid* sangat dihormati bukan hanya karena dipandang sebagai keturunan Nabi, melainkan juga karena jasa perjuangannya sebagai sebagai penyebar Islam dan ahli ilmu agama.

Setelah bermukim di nusantara, orang-orang Arab, kiranya tetap mempertahankan model stratifikasi *ala hadrami* sebagai pola hubungan dan interaksi sosial. Kaum *sayyid* masih mewarisi keutamaan sebagaimana di hadrami yang membuat mereka mendapatkan penghormatan dimasyarakat. Apalagi hal ini ditambah dengan beberapa keutamaan yang didasarkan kepada dalil keagamaan, seperti konsepsi *kafa'ah*, dimana seorang syarifah hanya boleh menikah dengan kalangan *sayyid*. Berkaitan dengan pernikahan dengan penduduk pribumi, orang-orang Arab cenderung menyesuaikan diri, yakni dengan menganggap bahwa asal usulnya masih murni atas golongan yang terlahir dari perkawinan laki-laki Arab dengan wanita pribumi. Mereka juga membuat wanita-wanita pribumi yang dinikahi mengikuti tradisi

dan kebiasaan yang ada di Hadramaut. Jumlah perkawinan dengan perempuan pribumi berkurang ketika peranakan Arab semakin banyak dilahirkan. Para peranakan Arab ini dibesarkan dengan cara Hadrami bahkan untuk mempertahankan ras dan bangsanya, dilakukan perjodohan dengan sesama orang Arab yang tinggal di tempat-tempat jauh, bahkan antara Hadramaut dan Hindia. Hal ini merupakan hal yang penting untuk menjaga kemurnian identitas klan mereka (Yusuf, 2016).

Dari pernikahan pasangan campuran ini lahirlah anak-anak keturunan Arab campuran yang disebut dengan peranakan Arab atau *muwalad*. Golongan *muwalad* inilah yang kemudian berbaur dengan penduduk setempat, dan membuat mereka lebih mudah diterima dibandingkan keturunan asing lain. Selain itu, interaksi tersebut melahirkan akses berupa pudarnya tradisi Arab dalam berbahasa dan berbusana. Orang Arab campuran cenderung menggunakan budaya pribumi. Mereka lebih sopan dan mudah bergaul dibandingkan dengan orang Arab yang lahir dari Hadramaut (Berg, 2010). Wajar, jika mereka menyebut penduduk pribumi dengan istilah *ahwal*, yang berarti saudara dari ibu-ibu mereka.

Komunitas Arab Batavia

Hingga akhir abad ke-17, tata kota Batavia dipisahkan antara kawasan Batavia dan kawasan penyangga di luar tembok kota atau *Ommelanden*. Umumnya, para penduduk kemudian membentuk pemukiman berdasarkan etnis asal, sehingga lahirlah pemukiman etnis Kampung Melayu, Kampung Bugis, Kampung Ambon, Pecinan, Pekojan dan sebagainya. Adapun keberadaan perkampungan etnis di kawasan tembok Batavia, awalnya berjalan secara alamiah, bukan sebagai hasil kebijakan politik pemisahan kolonial (Niemejer, 2012). Pada akhirnya, pengelompokan pemukiman secara sukarela, memberi keuntungan kepada pemerintahan kolonial dalam melakukan kontrol atas kawasan tersebut.

Pada abad 17-18, seiring dengan kedatangan orang Arab di Batavia, orang Arab di Batavia menjadi komunitas terbesar dari koloni-koloni Arab lainnya di Nusantara. Batavia sebagai kota dagang yang besar, memiliki daya tarik sebagai tempat tujuan kedatangan orang Arab dalam mencari peruntungan ekonomi. Hal ini sesuai dengan karakteristik pedagang yang menjadi profesi kebanyakan orang Arab. Pada awal abad ke-19, tercatat sekitar 400 orang Arab dan Moor tinggal di Batavia (Raffles, 1817). Jumlah orang Arab secara eksplisit baru disebutkan pada 1859, yakni 312 orang, sebagian besar tinggal di kota dan sebagian kecil lainnya tinggal di *Meester Cornelis* (Jatinegara), *Buitenzorg* (Bogor), dan Tangerang. Pada tahun 1870 jumlah mereka berlipat tiga kali lebih. Selanjutnya, pada tahun 1885, kota Batavia menampung 1.448 penduduk Arab, 972 orang diantaranya lahir di Hindia Belanda. Antara 1900-1930 minoritas Arab bertambah dari 2.245 menjadi 5.231, artinya 7 persen lebih dari keseluruhan populasi Arab di Hindia Belanda. Antara tahun 1930-1942, tidak begitu banyak perubahan yang signifikan terhadap jumlah populasi mereka. (Berg, 1886 ; Veth, 1907)

Di Batavia, lokasi perkampungan Arab terpusat di Pekojan, yang terletak di dekat pelabuhan sunda kelapa, dan berada diantara Pecinan dan kota tua. Kawasan Pekojan, awalnya merupakan kawasan tempat tinggal orang India yang kemudian seiring waktu tergantikan pemukim Arab. Lokasi pekojan yang dekat dengan pelabuhan, sangat strategis dalam mendukung pekerjaan orang Arab sebagai pedagang. Kelak, dalam prosesnya, pemukiman orang hadrami juga mengikuti keberadaan pasar, sebagaimana kemudian tampak dari keberadaan Krukut dan Tanah Abang. Orang-orang Hadhrami juga meninggalkan jejak bangunan-bangunan ibadah mereka berupa masjid Langgar Tinggi (1829) dan Masjid Jami An-Nawier (1760) di tepi selatan Kali Angke.

Pada tahun 1840-an, kelompok masyarakat keturunan Arab Pekojan sudah menjadi kelompok dan pemukiman yang mapan, seiring dengan kemajuan perdagangan dibidang kain,

katun, batu mulia, minyak wangi, hingga bisnis properti. Di Pekojan kemudian berdiri sebuah langgar Tinggi yang didirikan Syekh Said Na'um, yang menjadi salah satu tempat pengajaran Islam terkenal di Batavia. Saat itu penduduk Pekojan terdiri dari mayoritas Arab dan hanya beberapa gelintir etnis Cina. Berg menggambarkan wilayah Pekojan memiliki daya tarik bagi orang Arab tinggal disana, yang terus memancing kedatangan imigran, sehingga kemudian menjadi kawasan yang padat dan kumuh. Van Deventer bahkan menyebut Pekojan sebagai pemukiman yang kotor dan tempat berbahaya bagi kesehatan. Karena keadaan pemukiman yang tidak baik, akhirnya banyak orang Arab yang diam-diam keluar dari Pekojan, dan kemudian memilih tinggal di daerah pinggiran Batavia, seperti Krukut dan Tanah Abang.

Pada awal abad ke-19, seiring dengan semakin banyak dan terbanyaknya para pendatang, pemerintah Hindia Belanda membuat kebijakan yang mengharuskan orang-orang Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*), termasuk orang-orang Arab, tinggal didistrik yang terpisah. Tujuannya untuk menghindarkan mereka bercampur dengan penduduk pribumi, khususnya di desa-desa, karena pemerintah kolonial tidak ingin masyarakat pribumi terpengaruh oleh mereka. Kebijakan ini dikenal sebagai *wijkenstelsel* atau sistem distrik. Seiring keberadaan Orang Arab Batavia sebagai komunitas etnis yang sudah mapan, maka pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1844 menjadikan kawasan pekojan sebagai bagian dari Kawasan segregasi dengan mengangkat Said Na'um Basalamah sebagai Kapitan Arab. Jabatan ini merupakan jabatan yang memiliki makna bahwa keberadaan etnis tersebut diakui sebagai bagian kelompok sosial, sehingga diperlukan seorang kapitan yang menjadi penghubung antara komunitas masyarakat dengan pemerintah.

Politik segregasi yang dijalankan pemerintah kolonial, membuat setiap etnis dipisahkan dan cenderung eksklusif dalam kampungnya masing-masing. Selain itu, gerak mobilitas mereka juga dipersulit. Saat melakukan sebuah perjalanan, orang yang bepergian harus memiliki sebuah izin, yang dikenal dengan istilah *passenstelsel* atau sistem pas jalan. Orang Arab dibatasi dengan diwajibkan untuk memohon surat jalan kepada otoritas setempat bila hendak melakukan perjalanan darat dan laut (De Jonge, 2019). Dengan adanya surat izin ini setiap nama pemegang, tujuan, tempat keberangkatan harus disertakan izin dari Belanda. Dengan begitu sistem ini tidak memudahkan orang Arab untuk bepergian kemanapun. Untuk bepergian ke tempat yang tidak terlalu jauh pun mereka perlu membuat surat izin. Terkadang waktu yang digunakan untuk mengurus surat izin, lebih lama dibandingkan perjalanan itu sendiri. Kebijakan ini baru dihapuskan oleh pemerintah kolonial pada tahun 1910-an.

Selain politik segregasi di atas, kebijakan kolonial terhadap komunitas arab juga didasarkan pandangan atas Pan-Islamisme. Van den Berg misalnya, memiliki sudut pandang yang berbeda dengan Snouck Hurgronje. Ketika Berg menemukan beberapa kitab kumpulan khutbah Jumat yang menyebut Sultan Istanbul (Turki) sebagai kepala pemerintah (khalifah) yang sah yang dengan rajin memerangi kaum kafir, maka Berg tidak melihat hal tersebut sebagai bahaya, karena baik khatib (pribumi) maupun warga pribumi tidak mengerti isi khutbah tersebut. Pandangan ini berbeda dengan Snouck Hurgronje yang melihatnya sebagai sebuah hal berbahaya, sehingga mendukung upaya pemisahan orang-orang Arab dalam kampung khusus. Hurgronje menilai orang Arab juga merupakan bahaya laten sehingga harus diawasi dengan ketat. Ini menunjukkan bahwa sesudah pendirian kampung Arab dan kapitan Arab, diantara pihak kolonial sendiri, masih terdapat perbedaan tajam dalam mendefinisikan keberadaan masyarakat Arab di nusantara. (Abu Hamid, 1994 ; Peter Carey, 2011)

Dalam perkembangan berikutnya, keberadaan wilayah Pekojan yang sering dilanda banjir serta penghapusan sistem pemukiman pada 1919, membuat banyak pendatang Arab keluar dari Kawasan Pekojan. Pemukiman Arab kemudian meluas lebih dalam jumlah besar ke Krukut, dan kemudian juga ke Sawah Besar, Tanah Abang, hingga Kwitang. Pada tahun-tahun

berikutnya, orang Arab Pekojan mulai menyebar lebih jauh, hingga ke Bogor, dimana terdapat Kampung Arab Pekojan, sebagai bukti toponimi keberadaan mereka yang berasal dari Pekojan Batavia. Saat ini, mayoritas penduduk Pekojan bukanlah keturunan Arab Hadrami, tetapi lebih didominasi keturunan Tionghoa. Penduduk pekojan keturunan Arab yang tersisa hanyalah sekitar 25 persen dari keseluruhan populasi.

Uraian di atas menunjukkan bahwa sekalipun pemerintah kolonial merangkul keberadaan etnis Arab sebagai sebuah komunitas di Batavia, tetapi keberadaannya terus menerus diawasi dan diperhatikan. Snouck Hurgronje kemudian mengambil sikap untuk menjalin hubungan dengan Sayyid Usman bin Yahya, mufti Betawi yang sangat mendukung kebijakan kolonial untuk terus mengawasi potensi perlawanan Komunitas Arab dan Islam (Kaptein, 2017). Snouck memilih membiarkan orang Islam dan Arab, larut dalam praktik ibadah, agar tidak memberikan perlawanan dan ancaman terhadap pemerintah kolonial. Selain itu, Snouck juga memilih tidak ikut campur atas perdebatan antara Rabithah-Jamiat Kheir dengan Al Irsyad, seraya membiarkan konsepsi yang membedakan keturunan Arab dengan pribumi (Haikal, 2019).

Kapitan Arab Batavia

Kapitan Arab adalah sebuah jabatan atau posisi dalam pemerintahan kolonial Hindia Belanda ditunjuk dengan tugas memimpin etnis Arab-Indonesia, yang biasanya hidup terkonsentrasi di daerah-daerah yang telah ditentukan. Peran mereka adalah sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah kolonial, memberikan informasi statistik untuk pemerintah Hindia Belanda pada isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat keturunan Arab, untuk menyebarluaskan peraturan-peraturan dan keputusan pemerintah, dan untuk menjamin pemeliharaan hukum dan ketertiban.

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda memiliki hukum konstitusi yang mengakui tiga kategori individu di Batavia (dan kemudian diterapkan ke tempat lain), yaitu: Orang Eropa (*Europeanen*), Orang Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*), dan pribumi (*Inlander*). Orang-orang Arab, Tionghoa, dan India tergolong dalam kelompok Timur Asing. Karena semakin banyaknya imigran yang berdatangan dari Hadramaut, Pemerintah Belanda mulai menerapkan aturan yang disebut *Wijkenstelsel* pada tahun 1844 untuk memisahkan orang-orang Arab ini dari penduduk asli. Karena itu, pemerintah memerlukan seorang kepala kelompok yang disebut Kapitan Arab yang ditunjuk dari kalangan masyarakat Arab itu sendiri, sebagai titik kontak dan penghubung. Posisi yang serupa diberikan pula kepada masyarakat Tionghoa dengan sebutan Kapitan Cina. Lebih dari setengah jumlah keseluruhan Kapitan Arab yang ditunjuk oleh pemerintah kolonial adalah orang-orang non-sayyid. Keputusan ini dibuat untuk melemahkan anggapan sebagian Hadhrami tradisional tentang status sosial mereka. Para kapitan ini terkadang didampingi dengan seorang asisten yang disebut *Luitenant van de Kapitan der Arabieren* atau Letnan Arab.

Sebenarnya kedudukan kapitan Arab sendiri merupakan sebuah dilematis bagi masyarakat keturunan Arab. Kapitan Arab kurang disukai oleh kalangan masyarakat Arab yang terpandang, karenanya mereka selalu menolak jika pemerintah kolonial menunjukkan mereka sebagai kapitan Arab. Keberatan mereka disebabkan nama buruk para pengumpul pajak melekat pada pangkat tersebut, sedangkan kepala penduduk Arab ditugaskan untuk mengumpulkan pajak perusahaan, bahkan ada perkataan salah satu orang Arab: 'seperti anda ketahui, orang yang takut pada Allah, tidak akan menerimanya.'

Kapitan Arab pertama yang ditunjuk oleh pemerintah Hindia Belanda di Batavia adalah Said Na'um Basalamah yang memimpin komunitas Arab Batavia antara tahun 1844-1864. Ia digantikan oleh Muhammad bin Abubakar 'Aydid untuk periode 1864-1877, kemudian Muhammad Umar Ba'Behir 1877-1894, Umar bin Hasan bin Ahmad al Aydid 1895-1901,

Umar bin Yusuf Manggus selama periode 1902-1931 dan terakhir adalah Hasan Argubi antara 1931-1942.

1. Said Na'um Basalamah

Said bin Salim Na'um Basalamah adalah Kapitan Arab pertama di Batavia yang dikenal sebagai seorang tuan tanah, pedagang kaya raya serta seorang dermawan di Hindia Belanda pada abad ke-19. Salah satu bentuk kederwanannya adalah hibah tanah dalam jumlah yang luas di Kawasan Tanah Abang untuk digunakan sebagai tanah pemakaman. Menurut catatan cucunya, Abubakar bin Ali bin Shahab, Said Na'um adalah orang yang saleh dan taat dalam beragama. Said Na'um adalah figur yang senang berkumpul dengan orang-orang alim dan saleh serta memiliki kebiasaan menyumbang kaum fakir dan miskin (Shahab, 2000).

Said Na'um adalah seorang hadrami dan sempat tinggal di Palembang untuk sebelum kemudian pindah ke Pekojan di Batavia. Said adalah seorang pedagang kaya yang memiliki banyak kapal perdagangan dan sebagai tuan tanah di Batavia yang memiliki tanah yang sangat luas. Ia berasal dari fam basalamah, sebuah marga yang berasal dari kelompok *masyaikh* yakni stata sosial menengah hadrami.

Ia menikah dengan seorang gadis bernama Zainah binti Ubaid, yang memberinya satu-satunya putra bernama Muhammad yang kemudian meninggal, dan beberapa anak perempuan. Anaknya yang tertua bernama Syekhah, yang menikah dengan Sheikh Salim bin Umar Bahfen. Putrinya lainnya bernama Ruqayyah, yang menikah dengan Sheikh Abdullah bin Said Basalamah, dan anaknya yang terakhir bernama Nur, yang menikah dengan Sheikh Said bin Ahmad Jawwas. Semua dari mereka memiliki anak.

Setelah pindah ke Batavia, ia kemudian menikahi Nur binti Muhammad Audhah, yang memberinya seorang putri bernama Muznah yang kemudian menikah dengan Ali bin Abubakar bin Umar Shahab, seorang *Wulayti Hadhrami* (orang Arab kelahiran Arab yang tinggal di nusantara). Pernikahan Muznah dengan Ali Said ini memberikan Said Na'um beberapa cucu, yaitu Abubakar, Muhammad, dan Sidah. Cucunya yang bernama Abubakar kemudian menjadi kepala sekolah pertama di Jamiat Kheir.

Di Batavia, Said Na'um membeli sebidang besar tanah di daerah Pekojan yang disebut *Tanah Tinggi* yang kemudian di atas tanah tersebut, pada bulan November 1833 dibangun sebuah masjid yang disebut *Masjid Tanah Tinggi*. Popularitasnya yang dikenal luas oleh kalangan masyarakat Arab Batavia, membuat Pemerintah Hindia Belanda menunjuknya sebagai Kapitan Arab di Batavia dari 1844 hingga tahun 1864 (Regeerigs Almanak voor Nederlandsch Indie, 1903). Selain popularitasnya, pemerintah Belanda memilih Said Na'um karena beliau adalah orang yang mampu secara finansial atau kaya raya.

Ketika ia dipilih sebagai Kapitan Arab Batavia, pada tahun 1844, ia mewakafkan 22240 meter persegi bidang tanah untuk pemakaman di daerah Tanah Abang, Batavia. Pada tahun 1970-an, pemakaman wakaf tersebut dipindahkan ke lokasi pemakaman baru di kawasan karet oleh pemerintah dengan alasan penataan dan modernisasi kota Jakarta. Tanah pemakaman yang diwakafkan tersebut, saat ini dimanfaatkan sebagai rumah susun Tanah Abang Kebon Kacang serta masjid dan lembaga pendidikan yang menggunakan namanya, Said Na'um.

Saat menjabat sebagai Kapitan Arab Batavia, komunitas Arab yang berada di Pekojan sedang mengalami pertumbuhan lewat meningkatnya migrasi dari hadramaut. Sebuah kondisi yang menyebabkan pekojan menjadi kawasan yang padat serta mengami penurunan kualitas karena dinilai kotor dan tidak sehat. Hal inilah yang kemudian mendorong Said Na'um kemudian lebih mengembangkan Kawasan Tanah Abang, mengingat saat itu sudah terjadi perpindahan komunitas Arab dari Pekojan ke Tanah Abang. Dapat dikatakan bahwa dimasa

kepemimpinan Said Na'um, komunitas Arab Batavia sudah berkembang melewati bentang kawasan asalnya dan menyebar atau membuka pemukiman lain di Batavia.

Dimasa akhir hidupnya, kondisi fisik dan bisnis Said Na'um menurun. Said Na'um menyerahkan bisnisnya kepada seorang mantunya yang bernama Abdullah bin Said Basalamah. Said Na'um sendiri memilih hidup dengan anak perempuannya yang bernama Muznah bersama suaminya yang bernama Habib Ali bin Shahab. Tidak diketemukan informasi mengenai tahun wafatnya. Namun diketahui bahwa Said Na'um dimakamkan di pemakaman tanah wakafnya yakni Pemakaman Tanah Abang. Makam beliau terletak di dekat makam Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair, ulama penulis kitab *Safinatun Najah* yang wafat pada 1874.

2. Muhammad bin Abubakar 'Aydid

Informasi mengenai kehidupan Muhammad bin Abu Bakar Aydid bisa dikatakan sangat sedikit. Ia disebutkan dalam catatan *almanaac* pemerintah Hindia Belanda sebagai pejabat Kapitan Arab Batavia antara tahun 1864-1877. Dari keterangan yang lain juga disebutkan bahwa pada tahun yang sama juga disebutkan kapitan Arab Batavia yang lain, yang bernama Husin bin Muhammad Al Aydid. Jika mengacu kepada nasabnya, kemungkinan besar, Husin ini merupakan anak dari Muhammad. Sehingga bisa disimpulkan bahwa keduanya menjadi pemimpin komunitas Arab di Batavia, dimana sang anak membantu amanah yang diberikan kepada orangtuanya.

Dari fam atau marga yang tertera di belakang namanya, yakni al aydid, dapat diketahui bahwa ia berasal dari kelompok sadah atau sayyid, sebuah kelompok lapisan sosial yang dianggap terhormat karena mewarisi darah suci Nabi Muhammad SAW. Pemilihan sebuah marga atau fam sayyid menjadi pemimpin, memang kerap terjadi, karena keutamaan mereka dalam status keagamaan. Sehingga dengan demikian, diharapkan akan mempermudah pemerintah kolonial dalam pengaturan masyarakat.

Van Den Berg menceritakan sangat sedikit mengenai kehidupan Muhammad bin Abu Bakar Aydid, yang salah satunya adalah dukungan Sayyid Muhammad kepada pemerintah kolonial Belanda dalam perang Aceh. Untuk membalas dukungan tersebut, karena dianggap berjasa, maka pada tahun 1877, Muhammad bin Abu Bakar Aydid diberikan gelar kehormatan mayor dan dua tahun kemudian pangeran, yang artinya ia diberikan gelar tertinggi dalam status masyarakat pribumi.

3. Muhammad Umar bin Hasan Babeheer

Muhammad Umar Babeheer menjabat sebagai kapitan Arab Batavia antara tahun 1877-1894. Informasi mengenai kehidupan dan kepemimpinan Muhammad Umar tidak diketahui, selain daripada gelarnya sebagai Kapitan Arab Batavia. Dari namanya, diketahui bahwa marganya yakni Babeheer atau Babhir, berasal dari hadramaut, keturunan Bani Kindah yang termasuk ke dalam kelompok Arab aribah yani Arab asli yang mendiami kawasan hadramaut sejak awal (Bahafdullah, 2010). Kemungkinan besar, ia juga termasuk ke dalam orang yang berpengaruh, orang kaya dan juga seorang *wulaiti* atau orang Arab nusantara yang dilahirkan di negeri asalnya. Hal ini menjadi syarat utama dalam pemilihan kapitan Arab yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda.

Pada masa dipimpin oleh Muhammad Umar inilah, pemerintah kolonial Belanda melakukan sensus penduduk pada tahun 1885. Dari data yang disampaikan Van den Berg, diketahui bahwa saat itu penduduk Arab Batavia berjumlah 1448 jiwa, dengan rincian 476 wulaiti (lahir di Arab) dan 963 muwallad (lahir di nusantara), dengan jumlah pria sebanyak 1222 dan wanita sebanyak 224 orang. Populasi penduduk arab Batavia hanya kalah oleh

populasi penduduk Arab di Surabaya (Surabaya, Gresik, Mojekerto, Sidoarjo dan Sidayu) yang berjumlah 2056 orang (Berg, 2010).

Dari data tersebut, dapat diketahui, bahwa dimasa kepemimpinan Babeheer, orang Arab di Batavia mulai menjadi komunitas yang kuat, dimana kebanyakan orang Arab adalah mereka yang lahir di Indonesia. Mereka tidak lagi dimonopoli oleh para migran. Pada tahap perkembangan generasi kedua, biasanya akan terjadi proses penyesuaian terhadap budaya dan kebiasaan masyarakat setempat.

4. Umar bin Hasan bin Ahmad al Aydid

Umar bin Hasan bin Ahmad al Aydid menjabat sebagai kapitan Arab Batavia antara tahun 1895-1901. Tidak banyak informasi yang memuat kiprah beliau, selain Namanya disebut sebagai salah satu kapitan Batavia. Sebagaimana Muhammad bin Abu Bakar, Umar juga berasal dari kalangan elit Hadhrami, yakni fam sadah yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Agaknya pemilihannya didasarkan sebagai unsur simbolik saja, sebagai cara keberpihakan kaum sadah dalam urusan pemerintahan kolonial, mengingat statusnya yang dihormati dalam stratifikasi masyarakat hadrami.

Namun demikian, tercatat bahwa pada akhir 1800-an, yang diperkirakan saat kepemimpinan beliau, seorang sultan dari Hadhramaut yang bernama Sultan Mansur al Katiri mendatangi Pekojan. Sultan Mansyur terkejut melihat jumlah masyarakat Arab di Pekojan yang begitu banyak, dimana sebuah rumah dapat menampung sejumlah 20 anggota keluarga. Sang sultan kemudian berinisiatif untuk membuka wilayah baru di wilayah *Wijk Krukut Onderdistrict Penjaringan* atau krukut. Di wilayah antara Pekojan dan Krukut, yang masih berupa rawa, Sultan Mansyur secara bertahap membuka jalan dan membayar berupa uang real kepada Belanda. Kawasan inilah yang kemudian dikenal dengan nama Tanah Sereal, tanah yang dibeli se-real-real.

Dimasa kepemimpinan Umar bin Hasan al Aydid, kita mengenal bahwa pemerintah kolonial juga memiliki hubungan yang akrab dengan orang Arab lain yang merupakan ulama terkemuka ditanah Betawi, Sayyid Usman bin Yahya. Snouck Hurgronje, orientalis terkemuka, berkawan akrab dengan Sayyid Usman, dan bahkan dalam beberapa kasus, Sayyid Usman merupakan pendukung setia pemerintah kolonial Belanda. Sayyid Usman mengkritik pemberontakan petani banten 1888, mengkritik Gerakan tarekat yang dianggapnya melakukan penyimpangan serta mengkritik Gerakan protes lain yang cenderung merongrong pemerintahan kolonial. Di sisi lain, Sayyid Usman adalah seorang penulis handal, ulama yang melarang musik, pembela ahlusunnah serta sosok sayyid yang memperjuangkan kafa'ah (perkawinan harus melihat nasab dan derajat, seorang syarifah atau anak perempuan sayyid hanya boleh menikah dengan sayyid). Ia menulis beberapa kitab kecil yang menjadi pelajaran dasar orang-orang Betawi saat mempelajari agama atau hukum Islam, seperti *babul minan* dan *irsyadul anam*.

5. Umar Manggus

Umar bin Yusuf Manggus menjadi kapitan Arab Batavia antara tahun 1902-1931 (Lohanda, 2007). Berbeda dengan Muhammad dan Umar Aydid, Umar Manggus bukan berasal dari kelompok sadah. Sebelum tahun 1890, Umar hanyalah seorang kuli miskin, yang kemudian karena kegigihannya berhasil menabung dan menjadi pedagang properti yang sukses (*Bataviaasch Nieuwsblad*, 11-04-1940). Ia dikenal karena kontroversinya serta dukungannya terhadap Syekh Ahmad Surkati dan organisasi modernis Al-Irsyad. Diantara para kapitan Batavia, barangkali Umar Mangguslah, kapitan yang terpenting. Ia merupakan pendukung utama gerakan Islam Arab modernis, Al Irsyad.

Sebelum Umar Manggus diangkat menjadi Kapitan Arab, kebanyakan orang Arab telah menjatuhkan pilihannya kepada Sayyid Abdullah bin Husain Alaydrus, seorang saudagar yang kaya dan terkenal karena kedermawanannya dan perilakunya yang baik serta terpandang dikalangan masyarakat Arab dan orang-orang Eropa. Banyak orang yang menyangka dengan kedekatan hubungannya dengan orang-orang Eropa, ia akan bersedia dan menerima jabatan kapitan Arab. Pemerintah kolonial terus menerus mendesak agar ia menerima jabatan tersebut tetapi dengan tegas ia tetap menolaknya. Penolakan ini mendapat dukungan dari kalangan masyarakat Arab terpandang.

Setelah pemerintah kolonial tidak mendapatkan orang yang akan dijadikan boneka dalam menjalankan politiknya, maka pandangan pemerintah jatuh kepada Salim bin Awad Balweel, akan tetapi karena masuknya beberapa informasi yang dianggap akan merugikan kepentingan pemerintah, diantaranya adalah Salim Balweel sering menolong beberapa orang Arab untuk menghindari dari orang-orang Arab yang memberi pinjaman uang (tukang kredit) dengan bunga tinggi dan ia banyak bergaul dengan masyarakat dari ras-ras lain, menyebabkan ia gagal menduduki jabatan itu.

Selanjutnya pemerintah memberikan jabatan kapitan Arab itu kepada Umar Manggus yang banyak berhubungan dengan orang-orang Eropa dan jarang berhubungan dengan masyarakat Arab atau orang pribumi. Menurut Snouck Hurgronje, Umar Manggus kadang-kadang mempunyai tingkah laku sebagai orang kaya baru, yang tidak takut pada siapapun dan tidak mau mengaku kalah jika ia terlibat dalam perselisihan, kecuali kalau terpaksa. Karena itu, ia tidak banyak mempunyai teman diantara orang-orang Arab.

Banyak orang yang menyangka dengan kedekatan hubungan dengan orang-orang Eropa, ia akan bersedia dan menerima jabatan Kapitan Arab itu. Pemerintah kolonial kemudian secara terus menerus mendesak agar ia menerima jabatan itu, tetapi dengan tegas ia tetap menolaknya. Penolakan ini mendapat dukungan dari kalangan Sayyid yang menganggap bahwasanya jika seorang Arab menerima jabatan tersebut maka sama saja ia akan menjadi kaki tangan pemerintah Hindia Belanda. Pada akhirnya, Umar Manggus menerima jabatan tersebut, disaat tidak ada orang Arab lain yang memenuhi syarat menyatakan bersedia menjadi kapitan Batavia. Umar Manggus, seorang pedagang kaya dan memiliki bisnis property dilantik sebagai Kapitan Arab Batavia pada 28 Desember 1902 dengan Sheikh Ali bin Abdoellah bin Asir sebagai Letnan Arab-nya (*Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*: 15-06-1901). Sebagai jasanya menjabat posisi Kapitan Arab, Umar dianugerahi gelar kehormatan *De Ridder in de Orde van Oranje-Nassau* (Ksatria Ordo Orange-Nassau).

Suatu saat Umar Manggus mempunyai masalah dengan pengaduan masyarakat Arab melalui residen Betawi mengenai pembebasan tanah, pemerintah kolonial melalui Snouck Hurgroje membela Umar Manggus dengan menolak semua keberatan terhadapnya. Lebih jauh, Snouck menganjurkan agar pemerintah menegur residen Betawi tersebut. Pembelaannya terhadap Manggus bukan tidak mempunyai maksud, dibalik pembelaan itu ada maksud yang terkandung, yaitu agar pemerintah kolonial tetap dapat mengontrol perilaku masyarakat Arab melalui kaki tangan yang berfungsi sebagai kapitan Arab yang semakin hari sulit ditemukan. Snouck berpendapat bahwa merupakan sebuah hal yang sangat sulit untuk menemukan pribadi-pribadi yang agak cocok mau menjadi kepala penduduk Arab. Beberapa orang Arab yang paling terhormat dan terpandang satu demi satu menyatakan kepada Snouck, bahwa mereka lebih suka meninggalkan pulau Jawa daripada harus menerima jabatan sebagai Kapitan Arab.

Dalam arsip catatan "Nasehat Snouck Hurgronje dalam masa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda" terdapat informasi penting bahwa menurut pendapat beberapa orang dari masyarakat Arab, Umar Manggus dikatakan sebagai penindas orang Arab, hal ini berdasarkan penuturan Haji Rasim Bey seorang konsul Turki di Betawi yang pernah menyewa

rumah Umar Manggus. Oleh masyarakat Arab, Haji Rasim Bey dianjurkan untuk keluar dari rumah Umar Manggus, masyarakat Arab akan mengadukan kepada Konstantinopel tentang persahabatannya dengan penindas orang Arab, yaitu sahabat pemerintah Hindia Belanda, jika beliau tidak keluar dari rumah tersebut.

Ketika Umar Manggus menjadi kapitan Arab Batavia, jumlah orang Arab di Batavia meningkat pesat. Migrasi orang Arab sebagai bangsa pedagang ke nusantara, antara tahun 1912 sampai 1919 menunjukkan terus mengalir, meskipun terjadi kekacauan yang disebabkan Perang Dunia Pertama. Orang Arab baru yang datang dan mengajukan permohonan izin masuk ke Jawa berjumlah total 1.121 jiwa. Sekitar 75 persen adalah pedagang yang saat kedatangannya di Nusantara memiliki antara seratus dan seribu lima ratus gulden tunai dengan cara menjual barang (terutama yang terkenal madu daw'an) senilai seratus sampai seribu dua ratus gulden.

Gambaran ini memperkuat dugaan bahwa pada awal abad ke-20, mayoritas imigran Arab memiliki uang atau hubungan keluarga di Nusantara. Kontak usaha dagang bersama di antara masyarakat Arab lazimnya dilakukan secara lisan dan modal yang ditanamkan dalam setiap perusahaan selalu sangat kecil. Misalnya, modal 100.000 gulden dibagi diantara 20 sampai 30 perusahaan. Jadi mitra usahanya adalah para penjaja keliling atau pemilik toko kecil. Tidak ada orang Arab yang mau berisiko menanamkan modal besar di dalam satu perusahaan.

Masyarakat Arab punya tradisi bisnis diperantauan, begitupun dengan mereka yang ada di Batavia. Tiga bersaudara keturunan Arab klan bin Shahab dari Padang, Sumatera Barat, yang terdiri dari Sayyid Idrus, Sayyid Syehan, dan Sayyid Abubakar, tiba di Batavia pada 1920-an. Semuanya berprofesi sebagai pengusaha, yang memiliki harta berlimpah hasil warisan orang tua dan berbisnis. Namun misi utama mereka di Batavia adalah bukan untuk berbisnis melainkan memperkenalkan tradisi musik dan sandiwara khas mereka kepada warga Batavia. Ketika pada 1919 pemerintah kolonial telah menghapus *wijken stelsel* dan *passenstelsel*, Shahab bersaudara memilih tinggal di Sawah Besar sembari menjalankan bisnis di Sumatera. Mereka juga membeli sebidang tanah untuk gedung pentas, dimana rombongan mereka tampil secara teratur dan permanen di gedung tersebut.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa ekonomi dan perdagangan ketika masa jabatan Umar Manggus masih dapat tumbuh dan berkembang, meskipun saat itu terjadis ekonomi dunia malaise. Pedagang Arab masih mampu menjalankan kegiatan ekonomi dan bertarung nasib di Batavia. Hal ini tentunya tak lepas dari faktor Umam Manggus yang mampu mengelola tata administrasi yang baik, serta memiliki kharisma dan pengaruh yang kuat di dalam masyarakatnya.

Dalam bidang perkembangan pendidikan di komunitas Arab, Umar Manggus dikenal sebagai sosok yang tidak dapat dipisahkan dari dukungannya kepada Ahmad Surkati dan pendirian organisasi Islam Al Irsyad. Umar Manggus yang bukan berasal dari kelompok elit hadrami, ketika terjadi perbedaan pendapat antara Surkati dan Jamiat Kheir, berpihak kepada Surkati. Pandangan Surkati menekankan kesetaraan antara kelompok masyarakat Arab dan ummat Islam, berbeda dengan Jami'atul Khair yang menekankan eksklusifitas kaum sadah. Sebagai orang yang didatangkan Jamiat Kheir untuk mengajar, Ahmad Surkati kemudian memilih meninggalkan Jamiatul Khair pada 1914. Surkati pun bersiap untuk kembali ke Mekkah guna meneruskan kembali pendidikannya di kota suci itu yang terpaksa ditinggalkannya karena tugas mengajar di Batavia. Namun, niat Surkati oleh para sahabatnya, terutama Umar Yusuf Manggus. Mereka membujuk agar Surkati meneruskan aktifitas pendidikannya di Jakarta, setidak-tidaknya menanggungkan kepulangannya ke Mekkah.

Atas bujukan Umar Manggus, Saleh bin Ubaid Abdat dan Said Masy'abi, Surkati kemudian sepakat untuk bertahan di Batavia. Surkati kemudian pindah dari rumah tugas Jamiatul Khair di Pekojan, ke rumah baru di Jalan Jatibaru 12, Batavia. Di rumah baru tersebut,

pada 15 Syawwal 1332 H yang bertepatan Ahad 6 september 1914 M, dibukalah secara resmi Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyyah di bawah pimpinan Ahmad Surkati. Kawan-kawan Surkati, kemudian juga keluar dari Jamiatul Khair. Sebagian mereka kembali ke Mekkah dan sebagian tetap tinggal di Indonesia dan bergabung dengan Al-Irsyad sampai akhir hayat mereka di Indonesia. Izin untuk pembukaan dan pengelolaan Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyyah diberikan atas nama Ahmad Surkati.

Berdasarkan Ordonansi Guru 1905 (Staatsblad 550/1905) yang mengatur kegiatan pendidikan Islam, beban tanggung jawab sebuah madrasah akan terasa tidak terlampau berat apabila dinaungi oleh satu organisasi yang teratur dan berstatus badan hukum. Atas dasar itulah, kemudian dipersiapkan pendirian organisasi Jam'iyah Al-Ishlah wal Irsyad Al 'Arabiyyah. Untuk sementara, sambil menunggu pengesahan organisasi, pengurusan Madrasah dilaksanakan oleh suatu badan yang diberi nama Hai-ah Madaaris Jum'iyatul Irsyad yang diketuai oleh Sayyid Abdullah bin Abubakar Al-Habsyi. Perhimpunan Al-Irsyad sebagai Badan Hukum akhirnya memperoleh Pengakuan Hukum dari Gubernur Jenderal pada 11 Agustus 1915 melalui Keputusan Nomor 47, yang disiarkan dalam Javasche Courant nomor 67, tanggal 20 Agustus 1915. Al Irsyad yang disokong Umar Manggus kemudian menjadi organisasi Islam modernis yang berkembang pesat, sebagai antitesa dari Jamiat Kheir. Al Irsyad menekankan ide persamaan hak sebagai sesama muslim dan menolak eksklusifitas kaum sadah yang mewarisi model stratifikasi ala hadrami.

6. Hasan Argubi

Hasan Argubi adalah menantu dari kapitan Arab sebelumnya, Umar bin Yusuf Manggus. Beliau adalah lulusan Madrasah Al-Irsyad Pekalongan yang menikah dengan Ibu Nonong Manggus, tokoh dan aktivis Wanita Al-Irsyad di Jakarta. Hasan Argubi menggantikan dan meneruskan jabatan mertuanya, Umar Manggus, sebagai Kapitan Arab yang berakhir pada 1931. Sebagaimana mertuanya, Hasan Argubi adalah pengikut setia Ahmad Surkati dan selalu berada disampingnya hingga Surkati meninggal dunia.

Kedekatan dan kebaikan Hasan Argubi dilukiskan oleh Ahmad Surkati pada syairnya dalam buku *Al-Khawaathir Al-Hisaan*. Hasan Argubi dengan setia selama berbulan-bulan mendampingi dan menemani Surkati selama dalam perawatan matanya yang membuatnya buta setelah tiga kali dilakukan operasi mata di RSCM Jakarta, dahulu masih bernama CBZ (*Central Bergelijck Ziekenin Rachting*), di Jalan *Oranje Boulevard*, Batavia. Ahmad Surkati bahkan pernah melarangnya untuk tidak menemaninya terus menerus di rumah sakit, karena khawatir berdampak kepada aktivitas bisnis Hasan Argubi. Larangan tersebut tak dihiraukannya. Dia pula yang membawa Surkati untuk istirahat sementara waktu dengan menyewa sebuah pesanggrahan di Buitenzorg (Bogor) dan kemudian menemaninya selama istirahat untuk menghibur Surkati setelah ditimpa ujian kedua matanya yang sudah tidak dapat melihat lagi. Bagi Hasan Argubi, sosok Surkati bukan saja sebagai seorang guru yang menjadi telada, tetapi Surkati adalah sosok ayah sekaligus sahabat seperjuangan.

Hasan Argubi pertama kali duduk dalam *Hofdbestuur* atau Pengurus Besar Al-Irsjad setelah Kongres Al-Irsyad di tahun 1927, dengan ketuanya saat itu Ali Moegits. Sejak itu, ia hampir tak pernah absen duduk serta terlibat aktif dalam kepengurusan Al-Irsyad di tingkat nasional, termasuk mengetuai *stichting* atau Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang didirikan dan pertama kalinya diketuai oleh Syaikh Ahmad Surkati. Karena itu lebih populer disebut pula sebagai *stichting soorkatty*.

Dalam pergerakan wawasan kebangsaan melalui usaha persatuan kaum peranakan Arab, Hasan Argubi ikut andil dan merupakan pemula dalam gagasan pendirian Persatuan Arab Indonesia (PAI) yang diketuai oleh AR Baswedan. Pada 11 September 1934, dalam sebuah

pertemuan tokoh-tokoh Arab yang berlangsung di kediamannya di Batavia, ide pembentukan PAI dicetuskan dan disepakati rencana penyelenggaraan Kongresnya yang pertama di kota Semarang.

Sebagai kapitan Arab, Hasan Argubi juga melanjutkan kejayaan para pedagang Arab. Gambaran masyarakat keturunan Arab Batavia, Ketika ia menjadi kapitan tergambarkan lewat data sensus penduduk tahun 1930 yang menunjukkan bahwa 72,7 persen orang Arab bermata pencaharian dari berdagang dan hanya 10,6 persen yang hidup di sektor industri. Sisanya adalah bermata pencaharian disektor lain, seperti pendidikan. Jumlah persentase pedagang Arab, melampaui jumlah persentase mata pencaharian orang Cina sebagai pedagang yang hanya 57,7 persen, dimana sisanya sebanyak 20,8 persen berkecimpung di dunia industri. Walaupun orang Arab dan tionghoa mempunyai karakteristik serta latar belakang yang berbeda, tetapi mereka dikelompokkan dalam kelompok yang sama yakni sebagai “minoritas pedagang” (*trading minorities*) atau “minoritas perantara” (*middlemen minorities*). Mengingat faktor mereka merupakan etnis minoritas, dibandingkan dengan etnis lain yang bermukim di Batavia.

Para Kapitan Arab Batavia dalam Arus Perubahan

Kapitan Arab memiliki peran sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah kolonial, memberikan informasi statistik untuk pemerintah Hindia Belanda pada isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat keturunan Arab, menyebarluaskan peraturan-peraturan dan keputusan pemerintah, serta menjamin pemeliharaan hukum dan ketertiban. Sederhananya, Kapitan Arab memang difungsikan untuk menjaga orde ketertiban kolonial, agar pemerintahan kolonial tetap lestari dan tidak mendapatkan ancaman pemberontakan. Dengan demikian, hingga akhir abad 19, kepemimpinan para kapitan Arab cenderung memelihara model stratifikasi sosial ala hadrami yang telah baku dimasyarakat Arab Batavia.

Memasuki abad ke-20, gagasan modern juga menyebar dikalangan orang-orang Hadramaut, seperti juga modernisasi kehidupan orang Cina di Hindia Belanda. Beberapa bagian elit komunitas hadrami di Batavia, seperti Habib Abdullah bin Alwi Alaydrus memiliki kecenderungan bekerjasama dengan Turki Usmani dan menyetujui Pan Islamisme. Setelah didirikannya konsulat Turki di Batavia, sebagian masyarakat Arab mulai menyuarakan penyeteraan kedudukan mereka dengan bangsa Eropa. Beberapa orang Arab Hadramaut di Batavia menganggap konsul jenderal Turki sebagai wakil kekuasaan yang disegani, memiliki kemampuan membantu mereka dalam mencapai keinginannya. Tentu saja, hal ini apabila dibiarkan dapat menjadi ancaman serius (Hurgronje, 1992). Keberadaan orang Arab dengan identitas Islam, merupakan sebuah kesatuan utuh yang dapat memberi ancaman pemerintah kolonial.

Selanjutnya, pada 1901, orang-orang Arab Batavia juga mendirikan organisasi Arab Jamiat al-Khair yang baru disahkan pemerintah kolonial pada 1905. Kepemimpinan awal organisasi ini didominasi kelompok dari marga Bin Shahab dan al-Mashur, yang berasal dari kelompok sayyid sebagai simbol elit tradisional hadrami. Seorang non-sayyid, Salim bin Awad Balweel, juga berhasil mendapatkan posisi penting sebagai wakil ketua organisasi itu pada 1906. Pada 1906, berdirilah sekolah Jamiat Kheir di Pekojan, yang segera diikuti pendirian sekolah-sekolah serupa di Krukut, Tanah Abang, dan di Bogor. Selain mempelajari Al-Qur'an dan agama Islam, sekolah-sekolah ini juga memuat pelajaran "sekuler" seperti matematika, geografi, dan bahasa Inggris. Dari sinilah bermunculan sekolah-sekolah modern yang didirikan oleh orang-orang Hadramaut, baik sayyid maupun non-sayyid, di pelbagai kota (Pekalongan, Solo, dan Surabaya). Karena perkembangan sekolah Jamiat al-Khair makin pesat, dibutuhkan keseriusan dan perhatian yang lebih besar untuk terus mengembangkan mutu pengajaran.

Pada 1911, diundanglah Ahmad Surkati, seorang ulama kelahiran Sudan yang menerima pendidikan di Mesir, Medinah, dan Mekkah untuk menjadi inspektur pendidikan di sekolah-sekolah Jamiat al-Khair. Namun keberadaan Surkati di Jamiat al-Khair tidaklah lama. Pandangan reformis Surkati mengenai soal adat-istiadat yang bertentangan dengan ajaran Islam dan penolakan atas segala keistimewaan sayyid, melahirkan polemik dimasyarakat. Ide-ide Surkati yang menimbulkan kemarahan kelompok sayyid tetapi didukung semua kalangan lainnya, bukanlah gagasan yang berkenaan dengan persoalan agama murni, seperti penolakannya terhadap mistisisme dan bid'ah yang dianggapnya bertentangan dengan Qur'an dan Hadits. Ide-ide kontroversialnya terkait masalah sosial berkaitan dengan posisi mulia yang diklaim kaum sayyid sebagai hak mereka. Persoalan paling penting yang diperdebatkan adalah kebiasaan mencium tangan (*taqbil*), kesetaraan kedudukan antara pasangan nikah (*kafa'ah*), perantaraan (*tawassul*), dan penggunaan gelar kehormatan sayyid. Salah satu pemicu meluasnya isu kontroversi ini adalah ketika Surkati membolehkan pernikahan seorang syarifah atau perempuan keturunan sayyid, dengan non-sayyid. Pernyataan itu diungkapkan di Solo pada 1913 dan itulah mengapa kadang disebut sebagai "Fatwa Solo" (Patji, et al., 2008).

Surkati tidak menyetujui watak aristokratis para sayyid dan menolak peran yang dipegang sebagian dari mereka (entah yang sudah meninggal dunia atau yang masih hidup) sebagai perantara antara kaum mukminin dan Allah. Islam yang diajarkan Nabi SAW tidak membedakan para pemeluknya menurut leluhur atau kriteria lainnya. Surkati mendesak agar kebiasaan menyalami sayyid dengan mencium tangan untuk ditinggalkan.

Dalam polemik reformasi Ahmad Surkati, tokoh penting yang pertama kali mengikuti nasihat Surkati di depan masyarakat luas adalah Kapitan Arab Batavia Umar Manggus. Umar Manggus yang berasal dari status yang lebih rendah kedudukannya, dalam sebuah pertemuan menolak melakukan *taqbil* (mencium tangan) kepada seorang Sayyid bernama Umar bin Salim Alatas. Tradisi *taqbil* ini biasanya menjadi sebuah adat yang melekat yang menunjukkan spesialnya genealogi seorang sayyid, sehingga ia mendapatkan penghormatan yang luar biasa dalam masyarakat. Penolakan Umar Manggus ini, semakin memicu ketegangan di antara orang Arab, yang akhirnya menyebabkan perpecahan di antara mereka. Lebih lanjut, kelompok non sayyid kemudian menggugat gelar sayyid yang hanya melekat kepada keturunan Alawiyin. Bagi mereka, semua orang berhak menempatkan gelar sayyid di depan namanya, sekalipun ia bukan keturunan Nabi SAW. Sayyid berarti tuan, dan siapapun bisa disebut sebagai tuan oleh oranglain yang menghormatinya.

Perbedaan prinsip yang mendasar antara kaum sayyid dan non sayyid inilah yang menimbulkan perpecahan dan akhirnya bermuara pada pembentukan organisasi *Jami'at al-Islam wal Irsyad al-Arabia* atau yang sering disebut Al-Irsyad. Pendirian organisasi ini lebih disebabkan karena ketidakpuasan Umar Manggus dan sahabat-sahabatnya terhadap Jami'at Kheir dan kekesalannya terhadap kekakuan pemikiran para sayyid. Selain dukungan politiknya terhadap pendirian al Irsyad Al Islamiyyah, Umar Manggus juga memberikan sumbangan sebanyak 25.000 gulden.

Seperti Jamiat Khair, al-Irsyad juga bergerak dibidang pendidikan dan kebudayaan, seperti peningkatan kemampuan baca tulis di kalangan komunitas Arab dan pemajuan adat istiadat Arab yang sejalan dengan Islam (Pijper, 1992). Setelah didirikan Al-Irsyad di Batavia, maka gelombang pertumbuhannya berlangsung cepat dengan pendirian cabang-cabang Al Irsyad diseantero Nusantara. Al Irsyad menjadi symbol reformisme gerakan Islam modern orang Arab hadrami di Indonesia yang menolak model stratifikasi ala hadrami.

Semua episode perubahan pandangan atas stratifikasi terjadi saat Umar Manggus menjadi kapitan Batavia. Umar Manggus memiliki keberanian lebih untuk mendukung gugatan beberapa konsepsi patriarki dan deterministik yang dianggapnya tidak sesuai dengan

pandangan Islam. Pemerintah kolonial yang mendapatkan laporan pengaduan perwakilan kaum sayyid, memilih sikap untuk tidak ikut campur. Pemerintah kolonial meminta agar kedua pihak melakukan mediasi untuk mengatasi masalah ini, karena ini menyangkut identitas adat yang perlu diselesaikan secara otonom. Tentunya secara tidak langsung, sikap ini merupakan dukungan atas klaim Surkati dan pendukungnya, karena membiarkan klaim mereka terus menyebar dikalangan masyarakat arab dan kemudian mendapatkan lebih banyak dukungan.

Sikap pemerintahan kolonial Belanda yang cenderung pasif atas ketegangan komunitas Arab, tentunya menyiratkan bahwa kaum kolonial tidak ingin kehilangan mitranya yakni kapiten Arab yang berada dalam pusaran konflik tersebut. Figur Umar Manggus yang begitu kharismatik dan mendapatkan dukungan dari kelompok non-sayyid tentunya perlu juga diselamatkan, dengan tidak mendukung atau menolaknya.

Untuk menjaga perimbangan kekuatan, karena sikap netral tersebut, pemerintah kolonial juga menjalin hubungan secara informal lewat kerjasama secara personal dengan tokoh terkemuka kelompok sayyid seperti Sayyid Usman bin Yahya. Sebagai seorang ulama Betawi keturunan Arab terkemuka, Sayyid Usman berasal dari fam bin yahya, fam kaum sadah yang artinya menempati posisi sebagai elit tradisional hadrami. Pemerintah kolonial memberikan anugerah medali Bintang Mas, medali *Nederlanschen Leeuw* dan juga mengangkatnya sebagai *Adviseur Honorair voor Arabische Zaken* (Penasehat Kehormatan untuk Urusan bangsa Arab).

Menurut Snouck Hurgronje, Sayyid Usman mendapatkan penghormatan yang tinggi dari kalangan masyarakat Eropa, bangsa Arab dan terutama pribumi (Hurgronje, 1992). Di kalangan bangsa Eropa, Sayyid Usman dikenal karena pernah membuat peta negeri hadramaut. Di kalangan masyarakat Arab dan pribumi, Sayyid Usman dianggap sebagai seorang ulama yang sangat tegas dalam menegakkan hukum Islam, seperti penolakan atas bid'ah dan khurafat dalam kehidupan beragama, musik, dan lukisan.

Dalam hal yang terkait politik, sikap atau pandangan Sayyid Usman penuh dengan kontroversi. Ketika terjadi pemberontakan petani banten 1888, Sayyid Usman menentangnya dengan keras dan mengecam keberadaan tarekat yang dianggapnya bertentangan dengan syariat. Pada 1889 atau 1890, ia menulis kitab berjudul *Minhaj al-Istiqamah fi al-Din bi al-Salamah* yang berisi 22 praktik bid'ah yang terlarang dilakukan umat Islam. Salah satu yang ia kritik adalah sikap menentang pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada 1898, setahun setelah ia ditunjuk pemerintah kolonial sebagai Mufti Batavia, ia diminta menyusun doa khusus untuk Ratu Belanda Wilhelmina yang akan dilantik ke singgasana. Sayyid Usman lalu membuat doa untuk Sang Ratu seraya memuji pemerintah kolonial yang dianggap baik hati mengizinkan umat Islam menjalankan kewajiban agama dan menjaga ketenteraman tanah jajahan. Do'a itu dibacakan setelah salat Jumat, pada 2 September 1898 di Masjid Pekojan (Burhanudin, 2012). Kareel Steenbrink berpendapat bahwa Sayyid Usman hanyalah seorang ulama yang melihat bahwa Islam di Indonesia adalah Islam yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang resmi (Steenbrink, 1984). Karenanya sikap politik Sayyid Usman lebih bersifat sebagai langkah menyelamatkan kehidupan keagamaan agar tidak mendapatkan tekanan kaum kolonial.

Dalam hal stratifikasi masyarakat Arab hadrami, sikap Sayyid Usman mendukung eksklusifitas kaum sadah. Dalam kitab *al-Qawanin asy-Syar'iyah*, Sayyid 'Us'man berpendapat pernikahan yang tidak sekufu atau sederajat adalah tidak boleh atau haram. Seorang perempuan keturunan sayyid tidak boleh menikah dengan non sayyid atau ahwal. Hal inilah yang membuatnya berhadapan dengan Ahmad Surkati dan para pendukungnya.

Pada akhirnya, konflik antara kelompok sadah dan non sadah terus berlanjut, dimana kelompok non-sadah atau irsyadi mendapatkan dukungan dari Kapitan Arab Batavia yang kebetulan berasal dari kelompok non sadah. Dukungan ini memiliki dampak dan pengaruh

besar yang menunjukkan bahwa model stratifikasi ala hadrami tidak dapat dilanjutkan dalam suasana Batavia yang lebih egaliter. Kapitan Arab menjadi agen perubahan, yang meskipun berasal dari hasil produk struktur lama, tetapi begitu mendapatkan pencerahan interpretasi keagamaan yang dianggap lebih kuat, kemudian berusaha merombak kemapanan. Partai Arab Indonesia yang lahir kemudian adalah buah dari pohon konflik tersebut yang menjadikan komunitas Arab lebih meng-Indonesia.

Kesimpulan

Keberadaan Kapitan Arab Batavia, menghasilkan sebuah tinjauan ulang atas relasi sosial masyarakat Arab nusantara di Batavia antara 1844-1942, dimana sebagai sebuah komunitas etnik yang ajeg kemudian mengalami proses pembentukan identitas baru yang lebih bersifat *hybrid*. Kajian ini menyimpulkan bahwa kapitan Arab yang awalnya dibentuk sebagai sebuah kepanjangan tangan kolonial untuk mengontrol masyarakat, juga memainkan peranan penting dalam pembentukan struktur baru komunitas Arab di Batavia.

Dari enam kapitan Arab Batavia, tokoh yang memiliki peranan terpenting dalam perubahan tersebut adalah Umar Manggus. Umar berada pada situasi reformasi keagamaan dan pembaharuan hadrami, dimana ia sendiri merupakan pendukung utama gagasan Ahmad Surkati yang menolak eksklusifitas kaum sadah, serta organisasi Al Irsyad yang memiliki haluan islam modernis sebagai anti-thesa Jamiat Kheir. Kepemimpinan Umar Manggus yang memberikan banyak warna kontroversi dan perubahan dikalangan Komunitas Arab Batavia, disikapi pemerintah kolonial dengan sikap netral, yang dimaksudkan agar orang Arab Nusantara memiliki kesibukan tersendiri, sehingga mereka tidak berpartisipasi dalam gerakan nasional yang sedang menjadi trend pada awal abad-20. Ternyata perubahan tetap terjadi dan benih nasionalisme tetap tumbuh berkembang. Komunitas Arab Batavia kemudian membentuk wajah baru yang lebih Indonesia dan lebih egaliter dibandingkan daerah asalnya.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada Seluruh Dosen dan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta.

Daftar Rujukan

Abdullah bin Usman. tt. *Suluh Zaman*. Jakarta: Percetakan Sayyid Usman.

Alatas, S. F. (1997). *Hadhramaut and the Hadhrami Diaspora: Problems in Theoretical History*. In W. C.-S. U. Freitag (Ed.), *Hadhrami Traders, Scholars and Statemen in the Indian Ocean 1750s-1960s* (pp. 19-38). Leiden: Brill. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2650602>.

Amaruli, R. J., Maulany, N. N., & Sulistiyono, S. T. (2018). Sumpah Pemuda Arab, 1934: Pergulatan Identitas Orang Arab-Hadrami di Indonesia. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 3(2), 122-132. <https://doi.org/10.14710/jscl.v3i2.19748>.

Artono. (2001). *Komunitas Arab Di Kota Surabaya 1900-1942*. Yogyakarta: Penerbit Kendi

Athoillah, A. (2018). *Pembentukan Identitas Sosial Komunitas Hadhrami di Batavia Abad XVIII-XX*, *Jurnal Lembaran Sejarah*, 14(2), 150-170. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.45437>.

Bahafdullah, M. H. (2010). *Dari Nabi Nuh AS sampai Orang Hadhramaut di Indonesia: Menelusuri Asal usul Hadharim*. Jakarta: Bania Publishing.

Bataviaasch nieuwsblad. 11 April 1940.

- Berg, van D. (2010). *Orang Arab di Nusantara*. Depok: Komunitas Bambu.
- Blackburn, S. (2008). *Sejarah Jakarta 400 tahun*, Depok: Komunitas Bambu.
- Burhanudin, J. (2012). *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Politik Muslim Dalam Sejarah Indonesia*, Jakarta: Mizan.
- Carey, P. (2011). *Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855*, Jakarta: KPG.
- Castles, L. (2007). *Profil Etnik Betawi*. Depok: Komunitas Bambu.
- Chaer, A. (2015). *Betawi Tempoe Doeloe*. Depok: Masup Jakarta.
- Dutch East Indies. (1903). *Regeerings Almanak Voor Nederlandsch Indie 1903 Tweede Gedeelte*, Batavia: Batavia Landsdrukkerij.
- Garaghan, G. J. (1957). *A Guide to Historical Method*. New York: Fordham University Press.
- Giddens, A. (2004). *The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*, Pasuruan: Penerbit Pedati.
- Goldschmidt Jr, A. (2018). *A concise history of the Middle East*. Routledge.
- Gootschalck, L. (1986). *Mengerti Sejarah*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Haikal, H. (2019). *Indonesia - Arab Dalam Pergerakan Kemerdekaan*, Jakarta: Penerbit Forum.
- Hamid, A. (1994). *Syekh Yusuf Seorang Ulama Sufi dan Pejuang*, Jakarta: YOI.
- Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*. 15 Juni 1901.
- Heuken, A. (2007). *Mesjid-mesjid tua di Jakarta*. Jakarta: Cipta Loka Caraka.
- HS, A. F. (2011). *Jaringan Ulama Betawi*, Jakarta: Manhalun Nasyi-in Press
- Humaidi. (2016). *Etnis Betawi, Etnis Indonesia: Proses Peleburan dalam Etnis Betawi di Jakarta*. Universitas Andalas.
- Hurgronje, C. S. (1992). Islam dan Fonografi. In *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje IV*. Jakarta: INIS.
- Jonge, H. D. (2019). *Mencari Identitas: Orang Arab Hadhrami di Indonesia 1900-1950*. Jakarta: KPG.
- Kaptein, Nico J.G. (2017). *Islam, Kolonialisme, dan Zaman Modern di Hindia-Belanda: Biografi Sayyid Usman 1822-1914*, Yogyakarta: UMY Press.
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kuntowijoyo. (2001). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Lloyd, C. (1993). *The Structures of History*. Cambridge: Blackwell Publisher.
- Lohanda, M. (2007). *Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia*. Depok: Komunitas Bambu.
- Majalah Borobudur. Edisi tahun 1923.
- Mobini-Kesheh, N. (1999). *The Hadrami Awakening, Community and Identity in the Netherlands East Indies 1900–1942*. Cornell University Press.

- Niemejer, H. E. (2012). *Batavia: Masyarakat Kolonial Abad XVII*, Depok: Masup Jakarta.
- Patji, A. R., Hisyam, M., & Abdullah, T. (2008). Muncul dan berkembangnya faham-faham keagamaan Islam di Indonesia: periode reformasi Islam. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia..
- Pijper, G. F. (1992). *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi.
- Stapel, FW. (1930). *Geschiedenis van Nederlands Indie*. Volume IV 1930.
- Steenbrink, K. A. (1995). *Kawan dalam Pertikaian Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Steenbrink, K. A. (1984). *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang
- Sumanto, A. (1985). *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.
- Syarif, F., & Ansor, M. (2020). Mosque and reproduction of Arab identity in the Hadrami community in Betawi. *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*, 9(1), 78-114. <https://doi.org/10.31291/hn.v9i1.565>
- Taylor, J. G. (2010). *Kehidupan Sosial di Batavia*. Depok: Komunitas Bambu.
- Yusuf, A. (2016). Dinamika Ekonomi Masyarakat Arab di Batavia Tahun 1900-1942. *Buletin Al-Turas*, 22(1), 89-112. <https://doi.org/10.15408/bat.v22i1.2931>.
- Zuhdi, S. (2008). Metodologi Stukturistik dalam Historiografi Indonesia: Sebuah Alternatif. In. *Marihandono, Titik Balik Historiografi Indonesia*. Depok: Departemen Sejarah FIB UI bekerjasama dengan Penerbit Wedyatama Widya Sastra.